

# JURNAL HI

Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta

Dini Oktavia

## **[RESPON KOREA SELATAN TERHADAP JAPAN'S NEW SECURITY BILLS]**

Sebuah penelitian mengenai respon Korea Selatan terhadap pemberlakuan Japan's New Security Bills.

**RESPON KOREA SELATAN TERHADAP  
JAPAN'S NEW SECURITY BILLS  
(SOUTH KOREAN'S RESPONSE TOWARD  
JAPAN'S NEW SECURITY BILLS)**

**Dini Oktavia**

Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Ringroad Barat, Kasihan, Bantul, DIY, Indonesia 55183  
oktavia.dini2710@gmail.com

**ABSTRACT**

*Japan's New Security Bills became a controversial policy during the reign of Prime Minister Shinzo Abe. Abe administration claims that Japan's new security bills have positive goals both for inside and outside the country. Nevertheless, the South Korean government responded negatively the implementation of Japan's new security bills. This study will explain why the South Korean government responded negatively towards Japan's new security bills, using the concept of national interest and the concept of foreign policy decision-making in order to obtain better understanding about the specific reason that prompted the policy. The preliminary results of the research show that the South Korean government responded negatively toward Japan's new security bills because they overshadowed deep trauma of the past Japanese imperialism, in addition to the South Korean government regards the implementation of Japan's new security bills will have implications on bilateral relations, that the condition is quite susceptible. South Korean domestic political conditions, economic conditions and military capabilities to territorial disputes between Japan and South Korea became the most significant reason why South Korea responded negatively Japan's New Security Bills.*

**Keywords: Japan's New Security Bills, Japan, South Korea, Security**

## Pendahuluan

Korea Selatan merupakan sebuah negara di Asia Timur yang secara geografis meliputi bagian selatan Semenanjung Korea, dengan ibu kota Seoul. Batas wilayah sebelah utara adalah Korea utara yang pernah menjadi satu negara hingga tahun 1948. Sebelah barat adalah Laut Kuning, kemudian berbatasan dengan Laut Jepang yang biasa disebut sebagai Laut Timur oleh orang-orang Korea. Korea Selatan adalah negara yang pernah menjadi objek imperialisme Jepang. Sejarah pendudukan Korea oleh Jepang dimulai pada tahun 1905 setelah Perang antara Rusia dan Jepang. Pada tahun 1910, Tokyo secara resmi menganeksasi seluruh Semenanjung.

Korea mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1945 setelah Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Pasca kemerdekaan hubungan Korea dan Jepang berlanjut pada hubungan diplomatik setelah pemisahan Korea, Jepang dan Republik Korea (ROK) menjalin hubungan diplomatik pada Desember 1965, dibawah Perjanjian tentang Hubungan-Hubungan Dasar antara Jepang dan Republik Korea, dengan Jepang mengakui Korea Selatan sebagai satu-satunya pemerintahan sah di semenanjung Korea.<sup>1</sup>

Hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang mencapai titik baru ketika pada

tahun 1998 Presiden Korea Selatan Kim Dae-Jung dan Perdana Menteri Jepang Keizo Obuchi menandatangani *The Joint Declaration on a New Japan-South Korea Partnership Towards the Twenty-First Century*. Deklarasi bersama ini dibangun atas inisiatif untuk mengatasi kesenjangan persepsi sejarah dan memperluas hubungan ekonomi dan politik.<sup>2</sup> Hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang terus dijaga keharmonisannya dengan melakukan berbagai kerjasama bilateral, baik dalam bidang ekonomi, politik hingga kebudayaan.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan isu *Japan's new security bills*, pada tanggal 16 Juli 2015, majelis rendah Jepang menyetujui undang-undang keamanan yang didukung oleh Perdana Menteri Shinzo Abe, langkah menuju kodifikasi yang menjadi salah satu perubahan terbesar dalam postur keamanan Jepang sejak akhir Perang Dunia II. Terutama, undang-undang keamanan ini akan mengizinkan Pasukan Bela Diri Jepang untuk terlibat dalam *collective self-defense*. Bisa ditebak, undang-undang (yang masih harus disetujui oleh majelis tinggi Jepang) telah memicu reaksi keras dari tetangga regional Cina, yang sudah sangat waspada terhadap tanda-tanda bahwa Jepang berusaha untuk melakukan remilitarisasi.<sup>4</sup> Hingga akhirnya Pada September 2015, Komite Parlemen Jepang

telah mengesahkan undang-undang yang kontroversial mengenai *Japan's new security bills* tersebut. Pengesahan undang-undang ini memperbolehkan Jepang untuk memperluas peran militernya. Undang-undang ini disahkan meskipun terjadi beberapa bentrokan dalam parlemen.<sup>5</sup>

Pemerintahan Shinzo Abe mengklaim pemberlakuan *Japan's New Security Bills* ini memiliki tujuan positif baik untuk di dalam maupun luar negeri. Tujuan dalam negeri yaitu untuk menjaga keamanan dan integritas Jepang, sementara tujuan luar negeri adalah untuk berkontribusi pada stabilitas keamanan dan perdamaian dunia. Kontribusi pada stabilitas keamanan dan perdamaian dunia merupakan pilar penting dari kebijakan luar negeri Jepang, dan Abe menghormati permintaan masyarakat internasional yang menginginkan Jepang untuk bisa lebih berkontribusi bagi keamanan dunia dengan mempromosikan kontribusi proaktif Jepang untuk perdamaian internasional melalui pemberlakuan *Japan's New Security Bills*. Dengan pemberlakuan *Japan's New Security Bills* ini militer Jepang dapat berkontribusi salah satunya pada aktivitas peace keeping dan penyediaan dukungan logistik saat melakukan *collective-defense* untuk mengatasi situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional,

berdasarkan resolusi PBB atau konsensus internasional lainnya.<sup>6</sup>

Amerika Serikat dan ahli keamanan barat sendiri menyambut dengan baik kebijakan baru Undang-undang keamanan Jepang yang memperbolehkan militer Jepang untuk lebih aktif berpartisipasi untuk keamanan regional, dan tentu saja dapat membantu mengawasi Cina dan militernya di Laut Cina Selatan dan mendorong Jepang untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam aliansi keamanan mereka.<sup>7</sup> Berlawanan dengan Amerika Serikat, Korea Selatan memiliki respon yang negatif terhadap pemberlakuan *Japan's new security bills*. Pemerintah Korea Selatan merespon dengan cepat pemberlakuan *Japan's new security bills* pada 19 September 2015, menekankan bahwa pemerintah Korea Selatan tidak akan mentolelir berbagai macam tindakan militer oleh Jepang di Semenanjung Korea tanpa persetujuan pemerintah Korea Selatan.

Respon diberikan oleh Perdana Menteri Korea Selatan Hwang Kyo-ahn yang mengatakan pasukan pertahanan diri Jepang hanya bisa maju atau memasuki semenanjung Korea setelah berkonsultasi dengan pemerintah Korea. "*Japan's self*

*defense forces will be able to enter the Korean Peninsula in consultation with the Korean government.*"

Perdana Menteri Korea Selatan Hwang Kyo-ahn saat sesi interpelasi pada hari Rabu 14 Oktober 2015 mengatakan militer Jepang bisa maju ke semenanjung Korea setelah berkonsultasi dengan pemerintah dalam kasus situasi tak terelakkan dan dalam batas-batas yang diperlukan. Hwang juga menekankan, bagaimanapun, sikap prinsip Korea Selatan adalah bahwa militer Jepang tidak diizinkan untuk memasuki semenanjung tanpa persetujuan pemerintah, serta tidak ada militer asing manapun bisa datang ke wilayah Korea tanpa izin pemerintah Korea Selatan.<sup>8</sup>

Dengan kenyataan hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang pasca pembentukan hubungan diplomatik tahun 1965 serta deklarasi tahun 1998 yang terus diperbaiki dan dijaga keahmornisannya, serta tujuan pemberlakuan *Japan's New Security Bills* yang memiliki dampak positif untuk keamanan dunia, memunculkan pertanyaan mengapa Korea Selatan merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills*.

### Studi Pustaka

Untuk menganalisa permasalahan, penelitian ini membutuhkan sebuah konsep dan teori. Mohtar Mas'oeed menyatakan bahwa konsep merupakan abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu. Mohtar

Mas'oeed menyimpulkan bahwa suatu konsep sebenarnya adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan serta dalam ilmu sosial konsep menunjuk pada sifat-sifat dari obyek yang dipelajarinya misalnya, orang, kelompok, negara, atau organisasi internasional yang relevan bagi studi tertentu.<sup>9</sup>

Menjadi sebuah konsep yang penting dalam hubungan internasional, **konsep kepentingan nasional** memiliki banyak keterkaitan penting dengan kebijakan luar negeri. Menurut Reynolds,

*“Foreign policy consist of a range of actions taken by varying sections of the government of a state. The actions are taken with reference to other bodies acting on the international stage, of which the most important are other states, but which include, as we have seen, international, supranational, and transnational groups, and occasionally also individuals.”*

Selanjutnya Reynolds menyatakan bahwa kepentingan nasional adalah basis dari pembentukan kebijakan luar negeri. Berbagai kebijakan luar negeri ini diambil dengan memiliki tujuan. Lebih jauh Reynolds mengelaborasi bahwa tingkah laku negara dalam lingkungan internasional seharusnya merupakan tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dan tujuan-tujuan tersebut biasanya merupakan

cerminan dari konsep kepentingan nasional.<sup>10</sup>

Konsep kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah tujuan mendasar serta faktor paling penting yang menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional merupakan unsur vital bagi negara, kemerdekaan, kemandirian, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.

Dalam kasus Korea Selatan yang merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills*, dapat dipastikan keputusan tersebut dipengaruhi oleh adanya kepentingan nasional Korea Selatan. Kepentingan nasional yang ingin dilindungi pemerintah Korea Selatan adalah kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, hingga kesejahteraan ekonomi. Dengan kondisi politik domestik Korea Selatan yang kurang stabil pada masa pemerintahan Presiden Park Geun-Hye karena banyaknya skandal politik yang terjadi, menjadikan Korea Selatan khawatir instabilitas tersebut berdampak pada stabilitas politik maupun keamanan nasional Korea Selatan. Serta Korea Selatan masih memiliki trauma mendalam terhadap imperialisme Jepang, pemerintah Korea Selatan berusaha untuk selalu melindungi kemerdekaan yang telah diraih serta

keutuhan wilayah, keamanan militer, hingga kesejahteraan ekonominya. Kepentingan nasional tersebut secara otomatis mempengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dalam isu *Japan's New Security Bills*.

**Teori pengambilan keputusan kebijakan luar negeri** berkaitan erat dengan konsep kepentingan nasional. Dalam bukunya yang berjudul *Introductions to International Politics*, William D. Coplin mengatakan bahwa suatu negara pasti akan memutuskan kebijakan luar negerinya berdasarkan dengan apa yang menjadi kepentingan nasional negara tersebut. Terdapat beberapa aspek yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum suatu negara mengambil keputusan terhadap suatu isu. Menurut Coplin setiap kebijakan luar negeri yang diberikan dapat dilihat sebagai hasil dari tiga kategori pertimbangan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Yang pertama adalah politik dalam negeri dalam kebijakan negara-negara pengambil keputusan. Yang kedua adalah kemampuan ekonomi dan militer negara. Yang ketiga adalah konteks internasional, posisi tertentu di mana suatu negara menemukan jati dirinya khususnya mengenai hubungannya dengan negara lain dalam suatu sistem.<sup>11</sup>

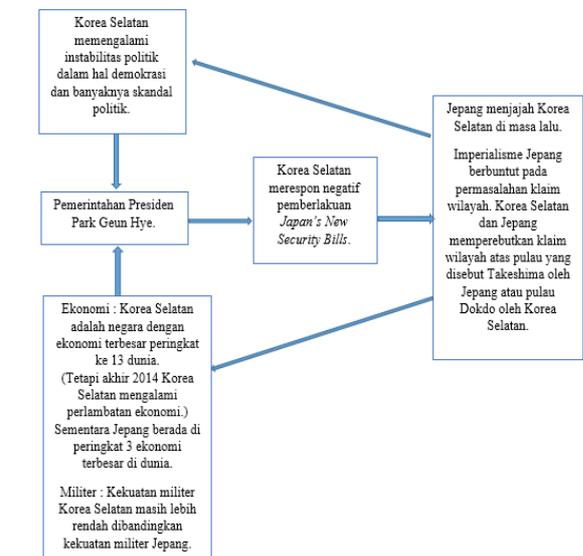
Dalam permasalahan Korea Selatan yang merespon negatif *Japan's New Security Bills*, hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi politik domestik Korea Selatan yang mengalami instabilitas dalam hal demokrasi. Demokrasi menjadi tantangan terbesar Korea Selatan pada tahun 2015, sejak pemerintahan Park Geun-Hye yang dimulai pada Februari 2013 tingkat demokrasi politik memerlukan perhatian khusus dan dapat dikatakan bahwa demokrasi liberal Korea Selatan berada dibawah ancaman. Serangkaian skandal politik telah menimbulkan keraguan atas mandat demokratis Partai Saenuri dan kepresidenan Park Geun-Hye, seperti dugaan intervensi Badan Intelijen Nasional dalam pemilihan presiden 2012 dalam mendukung Park Geun-Hye. Sudah bukan rahasia di Korea Selatan bahwa pemerintah konservatif telah menggunakan masalah keamanan untuk tujuan politik dalam negeri. Ditambah beberapa prasangka tentang administrasi Park Geun-Hye menyalahgunakan agenda keamanan untuk menyamarkan kinerja politik yang buruk. Dari awal masa jabatannya, banyak calon untuk posisi kunci pemerintah - termasuk perdana menteri - belum melewati proses dengar pendapat parlemen atau harus berhenti dari jabatan karena tersandung skandal seks maupun politik. Selain itu daftar tugas diplomatik termasuk hubungan yang lamban atau memburuk dengan Kim

Jong-un (Korea Utara), hubungan memburuk dengan Shinzo Abe (Jepang) dan menghadapi dilema dinamika Cina-AS.<sup>12</sup>

Selanjutnya melihat ke faktor kondisi ekonomi dan militer, Korea Selatan merupakan negara dengan Ekonomi terbesar peringkat ke-13 di Dunia dengan PDB yang relatif tinggi per kapita. Memiliki ekonomi yang kuat, diversifikasi dan memiliki industri dan basis manufaktur yang sangat kompetitif secara internasional. Tetapi, pada akhir 2014 Korea Selatan menghadapi perlambatan ekonomi, populasi yang menua, memburuknya ketimpangan sosial-ekonomi, meningkatnya pengangguran kaum muda, banyaknya utang rumah tangga dan kemerosotan pasar *real-estate*. Serta dari segi militer berdasarkan analisa Global Firepower (GFP) kekuatan militer Korea Selatan masih lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan militer Jepang, sehingga Korea Selatan mengkhawatirkan segala bentuk *collective-defense* militer Jepang yang berpotensi dilakukan di wilayah semenanjung Korea. Dari konteks internasional, Korea Selatan pernah menjadi objek imperialisme Jepang dari tahun 1910 hingga tahun 1945 yang mengakibatkan trauma mendalam bagi Korea Selatan. Imperialisme Jepang di Korea Selatan berbuntut pada klaim

wilayah yang dilakukan kedua negara. Saat ini Korea selatan dan Jepang masih memiliki isu perebutan klaim atas pulau yang disebut Takeshima di Jepang dan Dokdo di Korea Selatan. Pertengkarannya mungkin tampak kecil, terutama yang melibatkan kontrol perairan nelayan, tetapi hal tersebut berpengaruh besar terhadap hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami pengaplikasian konsep diatas, penulis membuat bagan ilustrasi aplikasi proses pengambilan keputusan luar negeri Korea Selatan terhadap isu *Japan's New Security Bills*, sebagai berikut.



## Pembahasan

Perubahan struktur militer Jepang termasuk didalamnya reinterpretasi pasal 9 dalam konstitusi Jepang tahun 1947 menjadi hal yang tidak bisa hindari. Dengan

pemerintah Jepang memberlakukan undang-undang keamanan yang baru atau *Japan's New Security Bills*, hal tersebut secara otomatis akan menuai berbagai reaksi baik dari dalam maupun luar negeri. Korea Selatan sebagai tetangga yang sangat dekat secara geografis dengan Jepang pada kenyataannya merespon secara negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills* ini. Dalam reinterpretasi baru konstitusi Pasifik pasca Perang Dunia II, militer Jepang diperbolehkan memberikan bantuan kepada sekutunya dalam pertempuran. Sementara langkah tersebut telah mendapat dukungan dari Amerika Serikat, banyak anggota parlemen di Korea Selatan, yang pada masa lalu secara brutal dijajah oleh Jepang pada tahun 1910-1945, melihatnya sebagai tanda ambisi kekaisaran Jepang. Di Korea Selatan tingkat dukungan terhadap Perdana Menteri Shinzo Abe tidak lebih banyak dari tingkat dukungan terhadap pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, tetapi pemerintah Korea Selatan bereaksi relatif menahan diri terhadap pemberlakuan *Japan's New Security Bills*.<sup>13</sup>

Meski bertindak relatif menahan diri, pemerintah Korea Selatan tetap menginginkan transparansi militer Jepang dalam melakukan praktik *collective self-defense* di Semenanjung Korea. Pada 19 September 2015, pemerintah Korea Selatan menekankan kepada pemerintah Jepang

bahwa Korea Selatan tidak akan mentolelir berbagai macam tindakan militer oleh Jepang di Semenanjung Korea tanpa persetujuan pemerintah Korea Selatan. Selain itu didasarkan pada penghormatan mutlak kedaulatan tiga negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Noh Kwang-il dalam *Media Briefing* di Seoul juga mengatakan pentingnya transparansi pemberlakuan undang-undang Keamanan Jepang.

Terhitung sampai awal 2016, Presiden Park Geun-hye tetap melanjutkan sikap waspada yang terukur menanggapi pemberlakuan *Japan's New Security Bills*. Pemerintah Korea Selatan berusaha untuk bersikap setenang mungkin dengan menunggu dan melihat dengan jelas bagaimana militer Jepang memberlakukan *Japan's New Security Bills* pada praktik *collective self-defense* mereka. Strategi politik membuat Presiden Park Geun-hye berusaha menahan diri meskipun sudah dengan jelas bahwa Korea Selatan merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills*.

Jepang dan Korea Selatan telah lama didefinisikan sebagai "tetangga dekat tapi jauh". Kedua negara dekat secara geografis, tetapi imperialisme Jepang di Semenanjung Korea pada tahun 1910-1945 telah meninggalkan bekas luka yang mendalam dan tetap menjadi subjek yang

menyakitkan bagi kebanyakan masyarakat Korea Selatan. Jepang telah menyatakan penyesalan atas perilaku masa lalu, tetapi merasa lelah karena tuntutan untuk permintaan maaf terus menerus diulang oleh Korea Selatan. Lebih dari setengah abad kemudian, rekonsiliasi penuh antara kedua negara belum tercapai. Baru-baru ini kedua negara dan para pemimpin mereka membuat upaya untuk bergerak melampaui masa lalu dan membangun hubungan yang lebih konstruktif antara dua negara maju di Asia Timur tersebut.

Hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan yang masih dalam bayangan masa lalu dan terus diperbaiki dengan berusaha menyelesaikan persoalan satu persatu harus kembali menemui batu sandungan saat pemerintah Jepang memberlakukan *Japan's New Security Bills*. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah Korea Selatan pasti menyadari pemberlakuan *Japan's New Security Bills* ini akan berimplikasi pada hubungan bilateral kedua negara. Apalagi saat masyarakat Korea Selatan begitu sensitif dengan berbagai kebijakan pemerintah Jepang yang berkaitan dengan isu sejarah hingga persengketaan teritorial.

Dengan pemerintah Jepang memberlakukan *Japan's New Security Bills*, pemerintah Korea Selatan yakin bahwa rasa tidak percaya kepada Jepang akan semakin

meningkat. Ketika rasa tidak percaya begitu tinggi hal tersebut akan berimplikasi pada hubungan bilateral kedua negara, terutama dalam kerjasama ekonomi. Hubungan bilateral yang dilandasi rasa tidak percaya akan membawa pengaruh buruk pada setiap bentuk kerjasama yang dilakukan. Terdapat dampak ekonomi yang memburuk dari tidak stabilnya hubungan antara Jepang dan Korea Selatan. Normalisasi hubungan bertepatan dengan melemahnya yen dan penguatan won, kemudian perlambatan perekonomian Korea Selatan. Nilai dolar dari perdagangan antara kedua negara telah jatuh dari tahun ke tahun dalam tiga tahun berturut-turut sejak 2012, selain itu terdapat penurunan jumlah wisatawan Jepang yang berkunjung ke Korea Selatan. Situasi tersebut sangat menimbulkan kekhawatiran dan mendorong Keidanren untuk mengeluarkan pernyataan yang menyerukan Jepang dan pemerintah Korea Selatan untuk mengatur pertemuan sesegera mungkin yang terlaksana pada November 2015.

Pemerintah Korea Selatan secara tegas merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills* oleh pemerintah Jepang, selain mempertimbangkan implikasi terhadap hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan, terdapat alasan lain yang secara signifikan mempengaruhi pemerintah Korea Selatan

dalam merespon pemberlakuan *Japan's New Security Bills* oleh pemerintah Jepang.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kepentingan nasional Korea Selatan masih dipengaruhi isu emosional disamping isu yang riil secara fisik seperti melindungi wilayah ataupun menjaga stabilitas ekonomi hingga keamanan. Pada kenyataannya masyarakat Korea Selatan masih larut dalam bayangan sejarah masa lalu imperialisme Jepang dari tahun 1910 hingga tahun 1945 yang meninggalkan trauma mendalam. Maka akan sangat wajar ketika kepentingan nasional Korea Selatan selain untuk selalu melindungi keutuhan wilayah, keamanan militer, hingga kesejahteraan ekonominya, juga harus melindungi kemerdekaan yang telah diraih karena bagaimana pun juga Korea Selatan tidak ingin merasakan kembali kekejaman imperialisme Jepang. Meskipun *Japan's New Security Bills* salah satunya memiliki tujuan untuk melindungi keamanan regional, bagi masyarakat Korea Selatan Undang-undang tersebut seperti hal yang dapat memicu sebuah peperangan. Sangat wajar saat pemerintah Korea Selatan mengambil keputusan luar negerinya untuk merespon negatif pemberlakuan Undang-undang tersebut jika mempertimbangkan kepentingan nasional Korea Selatan.

Kondisi politik domestik Korea Selatan pada masa pemerintahan Presiden

Park Geun-hye menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah Korea Selatan merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills*. Park Geun-hye merupakan Presiden ke-11 sekaligus Presiden pertama wanita Korea Selatan dan melayani masa jabatan presiden ke-18. Masa pemerintahan Presiden Park Geun-hye menjadi masa pemerintahan yang dapat dikatakan berperan “banyak” menjadikan kondisi politik domestik Korea Selatan tidak stabil. Instabilitas politik domestik Korea Selatan pada masa pemerintahan Presiden Park Geun-hye disebabkan oleh banyaknya skandal politik yang terjadi di lingkungan pemerintah sehingga mempengaruhi rasa percaya masyarakat Korea Selatan terhadap pemerintahan Presiden Park Geun-hye. Pemerintahannya yang dimulai sejak Februari 2013 ini dinilai sebagai pemerintahan yang konservatif, hal tersebut tercermin dari sikap politiknya yang salah satunya dianggap berorientasi pada penundaan perkembangan demokrasi. Tetapi para pendukungnya mengelak penilaian tersebut dan menyebut pemerintahan Presiden Park Geun-hye berkontribusi besar pada peningkatan ekonomi Korea Selatan.

Dengan kondisi politik domestik Korea Selatan yang tidak stabil sangat mungkin apabila pemerintah Korea Selatan merespon negatif pemberlakuan *Japan's*

*New Security Bills*. Pemerintah Korea Selatan harus mengambil tindakan tersebut untuk menjaga kestabilan politik domestik dengan menghindari penyebab eksternal yang berpotensi mengganggu kestabilan politik juga keamanan nasional, disamping kenyataan bahwa masyarakat Korea Selatan masih memiliki trauma yang mendalam terhadap imperialisme yang dilakukan Jepang di Semenanjung Korea dari tahun 1910 hingga tahun 1945.<sup>14</sup>

Beralih pada kondisi ekonomi dan kemampuan militer, secara umum peringkat kemampuan ekonomi dan militer Korea Selatan masih rendah apabila dibandingkan dengan Jepang. Faktor kondisi ekonomi dan militer Korea Selatan menjadi alasan lain mengapa Korea Selatan merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills* oleh pemerintah Jepang. Korea Selatan menempati urutan ke 13 ekonomi dunia, sementara Jepang berada di urutan ke tiga ekonomi dunia. Begitu pun dengan kemampuan militer, tahun 2015 Korea Selatan berada di urutan 11 sementara Jepang berada di urutan ke tujuh.

Pada tahun 2014 Korea Selatan mengalami perlambatan ekonomi, dan masalah ekonomi terus berlanjut hingga tahun 2015. terdapat pandangan bahwa situasi ekonomi Korea Selatan mirip dengan yang dialami Jepang sesaat sebelum masuk ke lesunya ekonomi Jepang yang

cukup berkepanjangan pada tahun 1990-an. Jepang tidak bisa mengabaikan kemerosotan ekonomi Korea Selatan karena Korea Selatan merupakan tujuan terbesar ketiga dari ekspor Jepang. Untuk itu kerjasama ekonomi baik dalam tindakan riil maupun berupa *shared value* ataupun *experience* sangatlah diperlukan Korea Selatan dan Jepang. Disamping jika memperhatikan aspek emosional Korea Selatan masih berada dalam bayangan masa lalu imperialisme Jepang, dengan adanya pemberlakuan *Japan's New Security Bills*, akan mempengaruhi tingginya rasa tidak percaya diantara kedua negara. Rasa tidak percaya akan menghambat berbagai bentuk kerjasama bilateral termasuk kerjasama ekonomi kedua negara. Sehingga pantas jika Korea Selatan khawatir isu tersebut dapat mempengaruhi kerjasama bilateral ekonomi Korea Selatan dan Jepang.

Beralih pada kemampuan militer Korea Selatan, Korea Selatan berada di urutan ke-11 dari 126 negara. Menurut *Global Fire Power rating index*, kekuatan militer Korea Selatan termasuk dalam predikat “*being perfect*”. Korea Selatan menempati urutan ke-11 di dunia dalam hal kekuatan militer, menurut situs *Global Firepower* yang menyediakan penilaian tahunan peringkat kapasitas perang negara dengan memperhitungkan jumlah dan keragaman senjata, faktor geografis,

logistik, sumber daya alam, industri dan tenaga kerja. Sementara kepemimpinan politik atau militer saat ini tidak dianggap. Korea Selatan turun dari peringkat ketujuh pada tahun 2015 dan peringkat kesembilan pada tahun 2014. Sementara Jepang setelah memberlakukan undang-undang yang baru atau *Japan's New Security Bills* naik dua peringkat ke urutan tujuh, setelah di tahun 2015 Jepang menempati urutan kesembilan dan ke-10 pada tahun 2014. Dengan fakta bahwa kekuatan militer Jepang berada di peringkat atas, sangat wajar apabila Korea Selatan mengkhawatirkan pemberlakuan *Japan's New Security Bills* dapat mengganggu keamanan nasional Korea Selatan dan stabilitas keamanan wilayah regional Asia Timur. Karena dengan *Japan's New Security Bills*, Jepang berpotensi melakukan praktik militernya di wilayah Semenanjung Korea dengan dalih membantu menyelesaikan konflik dan menjaga keamanan regional meskipun tidak ada izin dari pemerintah Korea Selatan.

Alasan lain yang menjadi penyebab pemerintah Korea Selatan merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills* adalah kekhawatiran pemerintah Korea Selatan terhadap potensi Undang-undang tersebut yang akan mempengaruhi perebutan klaim atas Pulau Dokdo/Takeshima oleh Jepang yang merupakan alasan berdasarkan konteks

internasional dalam bentuk *hostility*. *Japan's New Security Bills* selain memungkinkan Jepang untuk melakukan *Collective Self-defense*, secara otomatis akan membuat Jepang meningkatkan kekuatan militernya. Telah terbukti bahwa di tahun 2016 setelah Jepang memberlakukan *Japan's New Security Bills* peringkat kekuatan militer Jepang naik menjadi urutan ketujuh dari 126 negara, berbeda dengan Korea yang turun menjadi urutan ke-11.

Persengketaan Pulau Dokdo/Takeshima ini menjadi persengketaan yang signifikan mempengaruhi hubungan diplomatik Jepang dengan Korea Selatan. Dengan kondisi masyarakat Korea Selatan yang terus mengingat imperialisme Jepang di masa lalu sehingga trauma mendalam terus tertanam menjadi keputusan yang tepat bagi pemerintah Korea Selatan untuk merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills*. Pemerintah Korea Selatan diharuskan untuk selalu berusaha menjaga kepentingan nasionalnya yaitu kemerdekaan yang telah diarah dengan menjaga wilayah teritorialnya dari berbagai macam potensi eksternal yang mengancam keamanan nasionalnya termasuk pemberlakuan *Japan's New Security Bills* oleh pemerintah Jepang.

## Kesimpulan

*Japan's New Security Bills* merupakan reinterpretasi pada pasal sembilan konstitusi Jepang yang mendapat respon negatif dari pemerintah Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan secara terus menerus meminta transparansi militer Jepang apabila Jepang melakukan *collective self-defense* di wilayah Semenanjung Korea. Serta tidak akan mentolerir berbagai praktik militer Jepang di wilayah Semenanjung Korea apabila Jepang melakukannya tanpa seizin pemerintah Korea Selatan.

Pemerintah Korea Selatan mengkhawatirkan berbagai implikasi yang berpotensi terjadi terhadap hubungan bilateral kedua negara. Dengan kondisi hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan yang masih berada dalam bayangan masa lalu, pemerintah Korea Selatan mengkhawatirkan Undang-undang keamanan Jepang yang baru akan berpengaruh pada kerjasama bilateral kedua negara khususnya kerjasama ekonomi karena disebabkan oleh tingginya rasa tidak percaya antara kedua negara yang secara otomatis akan menghambat berbagai kerjasama yang dilakukan. Ingatan masa imperialisme Jepang pada tahun 1910 hingga tahun 1945 di Semenanjung Korea masih meninggalkan trauma mendalam untuk masyarakat Korea Selatan. Masyarakat Korea Selatan menganggap

bahwa pemberlakuan *Japan's New Security Bills* merupakan potensi perang.

Selain mempertimbangkan implikasi terhadap hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan dan tentu saja dengan memperhatikan emosi masyarakat Korea Selatan, terdapat alasan lain yang secara signifikan mempengaruhi keputusan pemerintah Korea Selatan untuk merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills*. Mempertimbangkan kepentingan nasional Korea Selatan yakni untuk melindungi kemerdekaan yang telah diraih pasca imperialisme Jepang, juga menjaga keutuhan wilayah, keamanan nasional hingga kesejahteraan masyarakat Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan mengambil keputusan kebijakan luar negeri dengan merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills*. Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri pemerintah Korea Selatan selain dipengaruhi kepentingan nasional negara juga dipengaruhi empat faktor yang dipertimbangkan ketika pemerintah mengambil keputusan kebijakan luar negeri. Diantaranya faktor kondisi politik domestik, aktor pengambil keputusan, kondisi kemampuan ekonomi dan militer, dan konteks internasional. Alasan-alasan tersebut menjadi faktor pendorong Korea Selatan merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills*. Korea Selatan

bagaimanapun diharuskan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional maupun regional Asia Timur, dalam hal ini merespon negatif pemberlakuan *Japan's New Security Bills* menjadi keputusan terbaik bagi Korea Selatan sebagai peringatan terhadap Jepang untuk selalu melaksanakan praktik militernya dengan bijaksana.

### [Notes]

- [1] The World FactBook. (2016). *EAST & SOUTHEAST ASIA- Korea, South "Introduction and Geography"*. CIA. Diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ks.html>.
- [2] James L. Scoff., & Duyeon Kim. (2015). "Getting Japan-South Korea Relation Back On Track." CARNEGIE Endowment For International Peace. Diakses dari <http://carnegieendowment.org/2015/11/09/getting-japan-south-korea-relations-back-on-track-pub-61918>.
- [3] Austin, Michael. (2015). *A New Era in South Korean-Japanese Relations Begins*, American Enterprise Institute. Diakses dari <https://www.aei.org/publication/a-new-era-in-south-korean-japanese-relations-begins/>.
- [4] McCury, Justin. (2015). "Japanese Soldiers Could Fight Abroad Again After Security Bill Passed" New York : The Guardian News. Diakses dari <http://www.theguardian.com/world/2015/sep/18/japa>

[nese-soldiers-could-fight-abroad-again-after-security-bill-passed#](#)

[5] Min-Ji, Kim. (2015). *Japan Passes Controversial Security Bills as Protests Rage on*. Seoul: ARIRANG TV NEWS. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=qkrROONM6hc>

[6] Masahiro, Akiyama. (2015), "*The Objectives of Japan's New Security Legislation*", The Tokyo Foundation. Diakses dari <http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2015/objectives-of-new-security-legislation>

[7] Tiezzi, Shannon. (2015). *China: Japan Security Legislation a "Nightmare Scenario"*. The Diplomat Magazine. Diakses dari <http://thediplomat.com/2015/07/Cina-japan-security-legislation-a-nightmare-scenario/>

[8] Coonie, Kim. (2015). *Japan's Self-defense Forces Will be Permitted to Enter Korean Peninsula Under Consultation*. Seoul: ARIRANG TV NEWS. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=800npdCwZMY>

[9] Mas'ood, Mohtar. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Yogyakarta: LP3ES.

[10] Basu, Rumki. (2012). *International Politics : Concepts, Theories and Issues*. New Delhi: SAGE Publications.

[11] Coplin, W. D. (1992). *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru.

[12] Keesok, Kim. (2015). "*Democracy is the biggest challenge for South Korea in 2015.*" East Asia Forum. Diakses dari <http://www.easiaforum.org/2015/01/14/democracy-is-the-biggest-challenge-for-south-korea-in-2015/>

[13] Rowland, Ashley., & Yoo Kyong-chang. (2014). "*South Korea tempers response to Japan's expanded military role*" Stars And Stripes. Diakses dari

[http://www.stripes.com/news/south-korea-tempers-response-to-japan-s-expanded-military-role-1.292268.](http://www.stripes.com/news/south-korea-tempers-response-to-japan-s-expanded-military-role-1.292268)

[14] Politicoscope. (2016). "*SOUTH KOREA POLITICS: Park Geun-hye Biography And Profile*," Politicoscope. Diakses dari [http://politicoscope.com/2016/11/07/south-korea-politics-park-geun-hye-biography-and-profile/.](http://politicoscope.com/2016/11/07/south-korea-politics-park-geun-hye-biography-and-profile/)

[15] BBC Asia. (2012). "*Profil : Dokdo/Takeshima islands*" BBC News diakses dari [http://www.bbc.com/news/world-asia-19207086.](http://www.bbc.com/news/world-asia-19207086)